



Hormati Masa Tenang

■ Bawaslu Awasi Potensi Politik Uang Hingga Keamanan Logistik Pilkada

Selama masa tenang ini, pengawas berperan penting dalam menjaga dari berbagai upaya yang bertujuan mempengaruhi hak pilih masyarakat.

KULON PROGO, TRIBUN - Hari pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tinggal beberapa hari lagi dan saat ini memasuki masa tenang. Jeda waktu sebelum hari pemungutan suara pada 27 November ini dinilai krusial dan membutuhkan pengawasan lebih. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY, Mohammad Najib, menyebut, pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) hingga pengawas di tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten memiliki peran penting di masa tenang ini. "Selama masa tenang ini,

● ke halaman 11

Hormati Masa

• Sambungan Hal 1

pengawas berperan penting dalam menjaga dari berbagai upaya yang bertujuan mempengaruhi hak pilih masyarakat," ujar Najib saat menghadiri Apel Siaga Kesiapan Pilkada 2024 di Kulon Progo, Minggu (24/11).

Ia menilai masa tenang hingga pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi kesempatan bagi para pengawas untuk membuktikan peran dan manfaatnya, khususnya dalam mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Adapun Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, menjelaskan apel siaga ini digelar guna memastikan kesiapan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024, terutama tahap pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November.

Marwanto mengatakan para PPS secara teknis memiliki tugas dalam memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dan memastikan suara dihitung dengan benar serta perbaikan terstruktur. Ia juga menilai PTPS bertugas melakukan pengawasan secara substandif, yaitu memastikan para pemilih menggunakan hak pilihnya murni dari hati nurani, termasuk memastikan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam memberikan suara.

Penjabat (PJ) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkatsiwi, mengatakan, pemungutan dan penghitungan suara jadi tahapan paling krusial dalam Pilkada 2024. Ia mengharapkan dedikasi dan integrasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, Bawaslu Bantul mengerahkan sekitar 1.900 personel pengawas tingkat kapanewon/kecamatan, pengawas tingkat kelurahan/desa, dan PTPS untuk melakukan patroli pengawasan secara aktif di masa tenang. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam patroli pengawasan itu, di antaranya meminta jajaran pengawas harus mampu memastikan semua jenis kegiatan atau aktivitas kampanye telah dihentikan oleh tim pengorganisasi, tim kampanye, maupun oleh paslon. Selain itu, pembersihan alat peraga kampanye (APK) dan memastikan untuk tidak ada lagi APK di lingkungan

tempat pemungutan suara. Pasalnya, pihaknya mencatat sempat saat ini masih ada APK yang belum ditertibkan.

Tadi, saya sudah bertemu dengan Kasatpol PT Bantul agar dibantu untuk menertibkan atau membersihkan terkait APK yang tidak terjangkau karena bersifat komersial," ujarnya.

Lalu, pihaknya akan menekankan kepada para pengawas agar melakukan pengawasan terkait dengan potensi adanya politik uang, ujaran kebencian, hoaks. Kemudian, pelaksanaan pengawasan patroli diharapkan untuk dilakukan secara offline dan online. "Dan, pada masa tenang ini, para PTPS diharapkan untuk memastikan kondisi keamanan logistik pemungutan dan perhitungan surat suara di TPS dalam kondisi yang aman pada 26 November 2024," tandas dia.

Setup kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul meminta semua pihak untuk menghormati masa tenang Pilkada 2024. Ketua KPU Gunungkidul, Asti Nuryanti, mengatakan masa tenang merupakan masa yang tak boleh digunakan untuk aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKU) Nomor 2 Tahun 2024.

"Pada masa tenang ini, semua pihak wajib menghentikan segala aktivitas yang berupa kampanye. Masa tenang ini, merupakan ruang untuk masyarakat untuk menentukan nanti memilih siapa. Jadi, sudah cukup memberikan informasi atau melakukan kegiatan kampanye," ujarnya.

Dia mengatakan, pihak yang melakukan kampanye di luar jadwal dapat dikenakan sanksi pidana berupa Pasal 187 Ayat 1 Undang-undang Pilkada. Dan, apabila mendapati kegiatan seperti kampanye pada masa tenang dapat segera melaporkan ke pihaknya ataupun Bawaslu.

"Mari bersama-sama untuk saling menjaga demi kesuksesan Pilkada 2024 ini," tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar seluruh media massa, baik cetak, elektronik, hingga online dapat mematuhi ketentuan terkait

pemberitaan selama masa tenang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, sejumlah larangan diberlakukan selama masa tenang, termasuk penyebaran iklan di media massa cetak, elektronik, media sosial, dan daring.

Distribusi logistik

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Hasya Ariessanodiro, mengatakan bahwa pendistribusian logistik Pilkada Kota Yogya akan dilakukan pada H-1 pencoblosan atau Selasa (26/11). Hasya menyebut, faktor cuaca, keamanan, dan jarak menjadi pertimbangan utama.

"Karena, wilayah Kota Yogyakarta kan tidak terlalu luas, terus jarak pendistribusian dari gudang logistik ke kelurahan dan ke TPS juga tidak terlalu jauh. Jadi kami memutuskan akan mendistribusikan logistik pada H-1 pemungutan suara atau 26 November 2024," ucap Hasya.

Hasya menyebut di Kota Yogyakarta terdapat 651 tempat pemungutan suara (TPS) di 45 kelurahan dengan 14 kementren. Selain karena aksesnya mudah, faktor risiko keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan serius dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024. Pihaknya mengaku sengaja menghindari kondisi logistik terlalu lama berada di TPS ataupun di kelurahan.

"Dalam hal kontrol, kami juga lebih mudah kalau logistik dikirim H-1 pencoblosan. Sehingga, untuk keamanan lebih tinggi dan kerawannya tidak terlalu tinggi," paparnya.

Faktor cuaca juga menjadi satu alasan tak terpisahkan. Di musim penghujan akhir ini, pihaknya berusaha mengantisipasi dan menjaga logistik dalam keadaan baik serta layak. "Kami sudah berkoordinasi terkait mitigasi bencana angin kencang dan air hujan deras dengan rekanan PT Pos Indonesia yang punya jejak pendistribusian logistik Pemilu kemarin. Jadi logistik akan didistribusikan menggunakan mobil boks tertutup ke 45 kelurahan di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Adapun kini pihaknya tengah melakukan cek logistik yang berada di dalam maupun di luar kotak suara. Setelah lengkap, lalu dilakukan packing dan pengepakan. Logistik tersebut

akan disusun ke dalam mobil boks sesuai tempat penerima. Lalu pada Selasa (26/11) pagi sekitar pukul 06.00 WIB rencananya akan dilepas oleh PJ Walikota Yogyakarta.

"Nanti PPS akan berkoordinasi dengan KPS untuk mendistribusikan atau mengambil logistik tersebut," ucapnya.

Politik uang

Fraksi Gerindra DPRD DIY mendesak kepolisian dan Bawaslu untuk mengambil langkah konkret dalam memberantas praktik money politik jelang coblosan Pilkada 2024. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, M. Lisman Puja Kesuma, mengatakan, praktik tersebut kerap terjadi pada masa tenang menuju pemungutan suara di empat kabupaten dan satu kota pada 27 November nanti.

"Politik uang itu ancaman serius bagi demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemilu. Kepolisian dan Bawaslu harus bertindak tegas dan cepat untuk menindak para pelaku. Mari kita wujudkan pemilu yang benar-benar luberjurdil," tandasnya.

Dalam pernyataannya, Lisman mengungkapkan, bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi di DIY. Ia pun menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum, untuk menjaga kelancaran, serta kejujuran pemilu. "Harapan besar kami, kepala daerah yang terpilih nantinya benar-benar adalah pilihan masyarakat, bukan hasil dari intervensi tidak bertanggung jawab melalui praktik curang seperti money politik," tambahnya.

Lisman juga menyoroti pentingnya peran aktif Bawaslu dalam menangani laporan pelanggaran, terutama terkait politik uang. Ia berharap, lembaga tersebut lebih responsif dalam mendokumentasikan temuan dan mengambil tindakan nyata, sekaligus mengajak masyarakat untuk berani melaporkan.

"Partisipasi masyarakat adalah kunci. Jangan takut melaporkan jika mengetahui adanya praktik curang. Ini demi menjaga kejujuran pemilu dan masa depan daerah kita," cetusnya. (sh/nel/ndg/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005